



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI IV JL. LAPANGAN BANTENG TIMUR NO.2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230 PSW 5704, (021) 3812684 FAKSIMILI (021) 3813039
SITUS www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S-4130 /PB.2/2018
Sifat : Segera
Lampiran : Satu lembar
Hal : Pemetaan Nota Kesepahaman (MoU) dan/atau
Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Kanwil
DJPb dalam rangka Pengembangan Kerja Sama
Ekonomi dan Keuangan Daerah

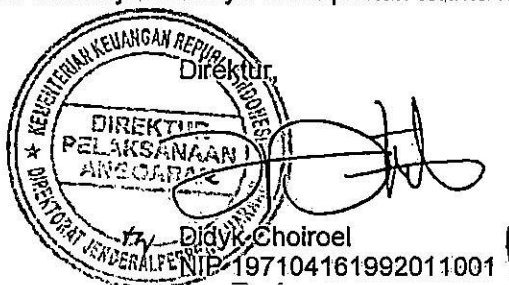
11 Mei 2018

Yth. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan rencana perpanjangan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Koordinasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah (KPEKD) antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Dalam Negeri, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Dalam Negeri berencana untuk melakukan perpanjangan Nota Kesepahaman Nomor MoU-6/MK.010/2016, Nomor 18/4/GBI/2016, dan Nomor 500/1516/SJ tentang Koordinasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah pada tanggal 22 April 2016 yang akan segera berakhir pada tanggal 22 April 2019.
2. Dalam rencana perpanjangan Nota Kesepahaman tersebut pada tahun 2019, Kementerian Keuangan yang diinisiasi oleh Ditjen Perbendaharaan bermaksud untuk menambahkan klausul implementasi Perjanjian Kerja Sama KPEKD pada tingkat daerah (PKS Daerah) yang dalam hal ini akan dilaksanakan oleh Kepala Kanwil DJPb, Kepala Perwakilan BI, dan Gubernur Provinsi setempat agar pelaksanaan MoU tingkat pusat di daerah dapat berjalan secara optimal, efektif, dan memiliki standar yang jelas.
3. Dalam rangka mendukung rencana implementasi PKS Daerah tersebut, maka dengan ini diminta bantuan Saudara untuk melakukan pemetaan atas MoU dan/atau perjanjian-perjanjian kerja sama yang selama ini telah dilakukan oleh Kanwil DJPb dengan para *stakeholder*-nya secara mandiri di daerah sebagai bahan evaluasi sebagaimana format terlampir.
4. Laporan dimaksud agar disampaikan kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran melalui pos-el lo.ditpa@gmail.com paling lambat pada tanggal 25 Mei 2018.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan

LAMPIRAN

Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran

Nomor : S- 4130 /PB.2/2018

Tanggal : 11 Mei 2018

**DAFTAR NOTA KESEPAHAMAN (MOU) DAN/ATAU PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM RANGKA KPEKD
YANG DILAKSANAKAN OLEH KANWIL DJTJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI
PER TANGGAL**

No.	NOMOR MOU/PKS	TANGGAL MOU/PKS		PIHAK YANG TERLIBAT*)	POKOK KERJA SAMA	OUTPUT	KETERANGAN
		MULAI	BERAKHIR				
1							
2							
3							
dst...	dst...	dst...	dst...	dst...	dst...	dst...	dst...

*) Pemda....., BI, BPS, dsb.....

..... Mei 2018
Kepala Kantor Wilayah,

.....
NIP